

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Renggang Education Pukap Indonesia.
- Bagir Manan. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung. Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.
- C.S. T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- Erna Sri Wibawati dan R Murjiyanto. 2013. *Hak atas Tanah dan Peralihannya*., Yogyakarta. Liberty.
- Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS). 2012. *Bantuan Hukum Untuk Semua (Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasi)*. Jakarta Selatan. Open Society Justice Initiative
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Herlien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Fikahati Aneska
- Irwan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya. Arkola.

- Hatta Isnaini Wahyu Utomo.2020. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat AktaTtanah*. Jakarta. Kencana
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Jakarta. Mahkamah Konstitusi RI.
- J. Satrio, Hukum Jaminan.2004. *Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Bandung.Citra Aditya Bakti
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*.1995. Edisi Kedua. Jakarta. Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, 2005. Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka*. Jakarta
- Kohar A, 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung. Penerbit Alumni
- Komar Andasasmita. 2000. *Notaris dengan Sejarah Peranan dan Tugas Kewajiban Rahasia Jabatan*. Bandung. Sumur.
- Mariam Darus Badruzaman.2009. *Kompilasi Hukum Jaminan*. Bandung. Mandar Maju
- Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rieneka Cipta
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta. Sinar Bakti.
- Muammar Himawan. 2004, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta. Bina Ilmu
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret
- Moch Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*. Jakarta.Alumni
- M. Nur Rasaid. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya. PT. Bina Ilmu

- \_\_\_\_\_. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Peradaban.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Rachmad Setiawan. 2020. *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*. Bandung. Yrama Widya.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers
- Riduan Syahrani. 2014. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya
- Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2019. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Depok. PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta. Kompas.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Ilmu Hukum Cet 8*. Bandung. Alumni
- Soejono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Pt. Sinar Grafika
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Bucdi Cahyono. 2005. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta. CV Gitama Jaya
- Supomo. 2005. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri cet 17*. Bandung. Pradnya Paramita
- Tan Thong Kie. 2005. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta. Ichtisar Baru Van Hoeve
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo

\_\_\_\_\_.2016. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo

Urip santoso.2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta. Kencana

Widodo.2017. *Metodologi Penelitian Populer&Praktis*. Jakarta. Raja Grafindo

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesie*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

### C. Jurnal

Berti Nova Khafifa Bazar, Ana Silviana. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Notarius Volume 14 Nomor 1*

Deviana Yuanitasari. 2017. Peran Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kontrak Standar Bagi Konsumen Indonesia. *Sriwijaya Law Review, Vol 1 Issue 2*. Juli

Luthvi Febryka Nola. 2016. Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia. *Negara Hukum* . Vol. 7 No. 1. Juni

Purna Noor A. 2018. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Melalui Jual Beli. *Lex Renaissance Nomor 1 Volume 3*

Riska Sri Agustin. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. *Lex Jurnal : Kajian Hukum Dan Keadilan*

R. Tony Prayogo. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pendoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.13 No. 02*. Juni.

Satjipto Raharjo. 2009. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum*

Sonya Putri Oktavia M Sarno, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari. 2021. Peran PPAT dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli, *Notarius Volume 14 Nomor 2*

Teresia Din, Lilik Mulyadi, Udin Narsudin. 2016-2017. Perlindungan hukum terhadap pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta otentik, *Jurnal Penelitian Legalitas. Vol 2 Nomor 2*

Varent Nathalia Putri , Rouli Anita Valentina. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Terkait Dokumen Palsu Melalui Card Reader. *Pilar (Pakuan Law Review) Volume 08 Nomor 01*

#### D. Tesis/Disertasi

Aria Zurneti. 2017. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Padang. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Unand, Padang.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S3. Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Purna Noor Aditama. 2017. *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli*. S2 Tesis. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Setiono. 2004. *Rule of Law*. Disertasi S3, Surakarta. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.

Titik Utami. *Pertanggungjawaban Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Melaksanakan Jabatannya dalam Pembuatan Akta*. Depok. Universitas Indonesia

#### E. Internet

Dr. Henry Sinaga, S.H., Sp.N., M.Kn. 2021. *Ironi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Merahasiakan Minuta Akta*. Hukum Online.

Gifari Zakawali. 2023. *Pajak Jual Beli Tanah : Dasar Hukum dan Cara Menghitungnya*. Orami

Luthfia Ayu Azanella. 2022. *Apa itu E-KTP?*. Kompas.com.

Soska Zone. 2018. "Notaris, Penghadap, Saksi, dan Akta," *Hasyimsoska*.